



Senyum siswa sekolah dasar di Maluku Tengah, mencerminkan semangat belajar dan suasana positif di ruang kelas.
(©Tim Komunikasi INOVASI)

Risalah Kebijakan

Mewujudkan Lingkungan Belajar Setara, Inklusif, dan Adaptif Perubahan Iklim di Kabupaten Maluku Tengah

Mendorong Transformasi Sekolah Inklusif dan Tanggap Iklim di Kabupaten Maluku Tengah: Strategi Mewujudkan Lingkungan Belajar yang Aman dan Setara



Capaian & situasi pembelajaran

Hasil Asesmen Nasional menunjukkan murid di Kabupaten Maluku Tengah belum menguasai kemampuan dasar dengan baik. Hal ini turut dipengaruhi oleh kualitas lingkungan belajar yang belum sepenuhnya aman, nyaman, dan mendukung pemenuhan kebutuhan murid.



Faktor yang memengaruhi kualitas lingkungan belajar

Tiga faktor utama yang memengaruhi kualitas lingkungan belajar murid di Kabupaten Maluku Tengah meliputi masih adanya perundungan dan kekerasan (termasuk kekerasan berbasis gender) di sekolah, aturan adat yang menghambat penanganan kasus kekerasan, serta praktik pendidikan yang belum maksimal mengakomodasi kebutuhan murid disabilitas. Selain itu, langkah mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang sistematis masih terbatas.



Rekomendasi kebijakan

Penting bagi pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk segera mengambil langkah nyata. Dari pemetaan situasi dan diskusi dengan pemangku kepentingan daerah, INOVASI memberikan beberapa rekomendasi kebijakan: (1) membentuk sistem pencegahan dan penanganan kekerasan yang responsif dan inklusif, (2) mendorong pemenuhan akomodasi yang layak bagi murid disabilitas, (3) memperluas akses bantuan sosial bagi murid dari keluarga miskin dan daerah terpencil, serta (4) menerapkan kebijakan dan program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang lebih berdampak signifikan.

Hasil Asesmen Nasional menunjukkan skor literasi dan numerasi murid di Kabupaten Maluku Tengah, Maluku (Kemendikbud, 2022) sebagai berikut:

Literasi : Laki-laki 48,36; perempuan 52,95

Numerasi : Laki-laki 36,91; perempuan 38,73

Masing-masing skor tersebut lebih rendah sekitar dua poin dari nilai rata-rata provinsi. Selain itu, murid perempuan secara konsisten memiliki capaian lebih tinggi dibandingkan murid laki-laki.

Berdasarkan temuan riset, pelaksanaan, dan evaluasi program INOVASI, rendahnya hasil belajar dan perbedaan capaian murid turut dipengaruhi oleh kualitas lingkungan belajar. Sekolah dapat menjadi tempat dan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung jika memupuk dan menerapkan nilai-nilai kesetaraan gender, inklusi disabilitas dan sosial, serta aksi perubahan iklim. Di Kabupaten Maluku Tengah, kesadaran, pengetahuan, dan praktik terkait isu-isu tersebut masih perlu diperkuat.

Temuan Utama

INOVASI telah melakukan pemetaan situasi kesetaraan gender, inklusi disabilitas dan sosial, serta perubahan iklim dengan para pemangku kepentingan daerah di Kabupaten Maluku Tengah pada Januari 2025. Dari pemetaan tersebut, faktor-faktor yang memengaruhi kualitas lingkungan belajar murid meliputi:



Kesetaraan gender

Rapor Pendidikan 2024 menunjukkan sebanyak 3-5 dari 10 murid merasa tidak aman dari perundungan (*bullying*), kekerasan fisik, dan kekerasan seksual di sekolah (Kemendikbud, 2024). Mayoritas kasus kekerasan adalah perundungan, dengan pelaku umumnya murid laki-laki. Upaya pencegahan, pelaporan, dan penanganan kasus kekerasan di tingkat sekolah maupun kabupaten belum berjalan efektif. Dua hambatan utama adalah norma adat yang menganggap kekerasan sebagai aib keluarga atau komunitas, sehingga kasus diselesaikan secara tertutup dengan denda adat. Kedua, penunjukkan kepala sekolah berdasarkan suku atau asal tempat tinggal, yang awalnya bertujuan menghindari penolakan dari kepala adat dan masyarakat setempat, mengurangi objektivitas penanganan kasus.



Inklusi disabilitas dan sosial

Dari 1.323 murid penyandang disabilitas (usia 5-18 tahun), sekitar 12% tidak sekolah dan 88% bersekolah. Mereka belajar di sekolah non-inklusi (76%), sekolah inklusi (4%), atau sekolah luar biasa/SLB (8%) (BPS & Kemendikbud, 2023). Namun, bagi mayoritas murid di kelompok ini, akses ke dan di sekolah masih belum memadai, ketersediaan guru pendidikan khusus (GPK) masih terbatas, dan stigma sosial tentang disabilitas masih kuat di masyarakat.

Di luar itu, masih banyak murid yang termarginalkan. Misalnya, murid yang berasal dari keluarga miskin, tinggal di daerah terpencil, atau belum fasih berbahasa Indonesia. Mereka menghadapi hambatan berlapis dalam mengakses layanan pendidikan yang layak.



Perubahan iklim

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)¹ Kabupaten Maluku Tengah mencapai 180,6 dari 250. Angka tersebut lebih tinggi dari indeks Maluku (160,03) dan Indonesia (132,25) (BNPB, 2023). Menurut IRBI, kabupaten ini berisiko tinggi mengalami gempa bumi. Namun, langkah mitigasi dan adaptasi bencana dan perubahan iklim belum tertata secara sistematis.

Beberapa tantangan utama antara lain (a) perilaku lingkungan: meski sudah memahami risiko, masyarakat masih melakukan perilaku yang merusak lingkungan (karena kepercayaan atau kebiasaan), seperti membuang sampah ke sungai dan membakar sampah, (b) pendidikan perubahan iklim: materi perubahan iklim belum terintegrasi dalam kurikulum dan perilaku ramah lingkungan di sekolah belum berkelanjutan (misalnya, pengelolaan hasil bank sampah belum jelas), (c) kesiapsiagaan: pemangku kepentingan belum memiliki regulasi, rencana, dan skema evakuasi bencana yang memadai.

¹ Penghitungan IRBI terdiri atas komponen bahaya (*hazard*, terkait fenomena alam), kerentanan (*vulnerability*, terkait kondisi fisik, sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan), serta kapasitas (*capacity*, terkait unsur ketahanan kelembagaan daerah).



Para siswa madrasah belajar secara kolaboratif melalui permainan edukatif di kelas.
(©Tim Komunikasi INOVASI)

Rekomendasi Kebijakan

Melihat temuan tersebut, penting bagi pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk segera mengambil langkah nyata. Berdasarkan pemetaan situasi dan diskusi dengan pemangku kepentingan daerah, INOVASI memberikan beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan pemerintah. Kebijakan ini akan berkontribusi langsung pada peningkatan capaian belajar dan kesejahteraan murid.



Dinas Pendidikan: Membentuk sistem pencegahan, pelaporan, dan penanganan kekerasan yang terpercaya, responsif, inklusif, dan efektif

1. Memastikan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di tingkat kabupaten dan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di setiap sekolah berjalan optimal. Satgas akan bekerja sama dengan TPPK untuk mengadvokasi program pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah, seperti pendidikan karakter dalam kurikulum, aturan dan SOP tertulis untuk kasus kekerasan, serta pendampingan korban dan saksi.
2. Memperkuat pelaksanaan program-program pengembangan kapasitas kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan, terutama mengenai isu kesetaraan gender (termasuk pencegahan kekerasan, pengelolaan perilaku, dan penerapan disiplin positif di sekolah), inklusi disabilitas dan sosial, serta perubahan iklim.



Dinas Pendidikan & Dinas Sosial: Mendorong pemenuhan pelayanan dan akomodasi yang layak bagi murid penyandang disabilitas

1. Mendukung pengembangan peraturan daerah atau peraturan bupati tentang pendidikan inklusif dan memasukkan program layanan disabilitas dalam rencana strategis daerah. Langkah ini bertujuan menjamin penyediaan akses dan fasilitas belajar yang layak bagi murid penyandang disabilitas.
2. Mengumpulkan data terkait ragam, tingkat kesulitan, dan kebutuhan murid penyandang disabilitas secara berkala dan mengelolanya secara terpusat melalui *dashboard* Profil Belajar Siswa (PBS), yang terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Selanjutnya, data disabilitas bisa menjadi landasan pembentukan kebijakan, pemberian dukungan, dan penguatan kapasitas guru untuk memenuhi akomodasi murid, khususnya dalam pembelajaran di kelas.
3. Membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD) bidang pendidikan di tingkat kabupaten dan membentuk tim kecil di tingkat kecamatan. Langkah ini bertujuan menjangkau murid penyandang disabilitas serta memastikan aksesibilitas sumber daya dan layanan yang dibutuhkan.
4. Mengupayakan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) khusus bagi murid penyandang disabilitas agar layanan dan bantuan yang diberikan semakin optimal dan tepat sasaran.



Dinas Sosial: Memperluas akses program kesejahteraan sosial dan bantuan ekonomi bagi murid dari keluarga miskin dan daerah terpencil

1. Melakukan sosialisasi program dan bantuan (seperti Program Keluarga Harapan, Program Indonesia Pintar, dan program subsidi silang) secara langsung ke masyarakat, terutama murid dari keluarga miskin dan di daerah terpencil. Melalui sosialisasi ini, mereka dapat mengetahui dan segera mengakses bantuan pendidikan yang relevan.
2. Bekerja sama dengan sekolah dan organisasi masyarakat untuk mengoptimalkan jangkauan dan akses murid terhadap program dan bantuan pendidikan.



Dinas Pendidikan & Dinas Lingkungan Hidup: Menerapkan kebijakan dan program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang lebih berdampak signifikan

1. Mendukung pembentukan peraturan daerah atau peraturan bupati tentang integrasi pendidikan perubahan iklim dalam kurikulum. Regulasi ini bertujuan mengikat setiap sekolah untuk memasukkan isu perubahan iklim dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).
2. Bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk merancang skema dan simulasi evakuasi bencana di sekolah. Dengan begitu, murid dan guru memiliki kesiapsiagaan, mampu merespons bencana, dan beradaptasi terhadap perubahan iklim.
3. Memperluas sosialisasi kebijakan dan program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang telah berjalan, terutama secara langsung ke masyarakat di daerah terpencil. Langkah ini bertujuan membangun kesadaran masyarakat dan mengubah perilaku mereka.